

## KOLABORASI PEMKOT DAN BAZNAS KOTA YOGYA

# Pemberdayaan Ekonomi Produktif Sokong Pengentasan Kemiskinan

**YOGYA (KR)** - Kolaborasi antara Pemkot Yogya dengan Baznas Kota Yogya terus berlanjut. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi produktif guna menyokong percepatan pengentasan kemiskinan.

Ramadan kali ini juga menjadi momentum dalam menggulirkan program pemberdayaan ekonomi produktif. Pekan lalu, Pemkot bersama Baznas Kota Yogya menyalurkan bantuan usaha senilai Rp 20,9 juta bagi tiga pelaku usaha kecil. "Kalau masyarakatnya itu menjalankan usaha dengan baik dan dapat terus berkembang, kemudian pertumbuhan bisnisnya juga bagus maka kami ikut senang karena ini juga merupakan bentuk dukungan dari program percepatan pengentasan kemiskinan itu sendiri," ungkap Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, Minggu (17/3).

Angka kemiskinan di Kota Yogya cenderung menurun setiap tahun. Akan tetapi tren penurunannya masih stabil

sehingga perlu ada percepatan. Hingga akhir tahun 2023 lalu, angka kemiskinan di Kota Yogya merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 6,49 persen atau sekitar 29.480 jiwa. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari angka kemiskinan di DIY yang mencapai 11,04 persen.

Singgih mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot yang berkolaborasi dengan Baznas Kota Yogya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Apalagi tiga warga yang menerima bantuan usaha merupakan sosok ibu-ibu yang tangguh dan masih produktif menjalankan usaha. Harapannya bantuan modal yang disalurkan tersebut bisa se-

makin mendukung pertumbuhan dan kelancaran usaha yang dijalankan.

"Ada yang jualan sembako di rumah itu mendapat bantuan modal. Kemudian bantuan etalase untuk dagangan serta peralatan masak yang kami harap dengan bantuan ini usahanya makin laris dan lancar. Sehingga pendapatan ataupun pemasukannya juga bertambah," ujarnya.

Singgih juga menambahkan, bantuan lainnya berupa tambahan modal pengembangan usaha diberikan kepada Mina Tani Lowanu sebagai kelompok tani yang fokusnya pada pembibitan dan ternak ikan lele, nila dan gurami. Dirinya sempat melihat ada beberapa tong untuk budidaya ikan namun kondisinya masih kosong. Bantuan yang diberikan itu pun harapannya mampu mendukung pengembangan komoditas. "Kalau usaha perikanan makin lancar tentunya juga akan mendukung penyediaan pangan segar yang berkualitas di Kota Yogya,"

tambahnya.

Ketua Baznas Kota Yogya Syamsul Azhari, sebelumnya mengatakan dalam menggulirkan bantuan atau program pemberdayaan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pemkot Yogya. Langkah ini merupakan bentuk dukungan dalam keberlangsungan program pemerintah berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Hal itu pun selaras dengan salah satu program pentasyarufan yang mendasari setiap kegiatan Baznas yakni *Jogja Sejahtera*.

"Selain Jogja Sejahtera juga ada Jogja Taqwa, Jogja Peduli, Jogja Sehat dan Jogja Cerdas. Itu semua merupakan program unggulan dan selalu kami koordinasikan bersama Pemkot dalam penentuan target supaya tepat sasaran," tandasnya.

Kolaborasi yang dibangun itu juga memberikan kemanfaatan ganda. Selain tepat sasaran, beban APBD untuk pemberdayaan juga semakin ringan. Apalagi

ada beberapa kondisi yang membuat pemerintah belum bisa menjangkau sasaran dalam waktu cepat karena aspek prosedural. Sehingga keberadaan Baznas bisa saling mengisi dan memberikan dukungan.

Sementara Pengelola Mina Tani Lowanu Tri Haryanta, menceritakan selama ini hasil panen didominasi ikan lele dan diambil oleh lima orang pedagang. Kurang lebih panennya sekitar dua bulan sekali, yang penghasilannya juga digunakan untuk mendukung operasional Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah. "Kalau di bakul itu kami jual per satu kilogram ikan lele Rp 20.000. Sementara sekali panen sekitar 70 sampai 150 kilogram dalam waktu dua setengah sampai tiga bulan sekali. Selain dijual kami juga kirim ikannya ke panti untuk konsumsi anak-anak. Semoga melalui bantuan ini bisa semakin berkembang dan membuahkan hasil yang lebih optimal," paparnya. **(Dhi)-f**

## FPKHI Genjot Istithaah Kesehatan Haji

**YOGYA (KR)** - Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia (FPKHI), jelang pelaksanaan Ibadah Haji 2024 terus menebar manfaat dan menggapai berkah. Seperti yang mereka lakukan di awal-awal bulan Ramadan 1445H kali ini.

"Kami sudah menggelar tarhib Ramadan, seperti podcast kesehatan haji dan lainnya. Termasuk kami melaunching kartu tanda anggota FPKHI guna menjangkau anggota perawat alumni petugas kesehatan haji," tutur Ketua DPP FPKHI Ns Turiman kepada KR, Minggu (17/3).

Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh Kakanwil Kemenag DIY Dr Masmin Afif. Menurutnya, informasi terkait haji seperti Istithaah kesehatan jemaah harus terus disampaikan kepada masyarakat.

"Sehingga diharapkan jemaah akan lebih mandiri dengan kesehatan yang lebih prima," kata Masmin.

Ditambahkan, dengan semakin dekatnya penyelenggaraan ibadah haji 2024, calon petugas telah dipersiapkan dengan

mengikuti pelatihan. Harapannya tentu kompetensi setiap petugas sudah lebih siap.

"Untuk calon jemaah haji harapannya tetap menjaga kesehatan mulai dari membiasakan aktifitas juga menjaga kebugaran dan bisa melaksanakan aktivitas secara mandiri," ucap Masmin. Kondisi kesehatan jemaah haji ini juga tidak terlepas dengan fisik dan mentalitas. Dikatakan dr Rina Sugiyanti SpKJ dari RSK Grhasia, kesehatan mental tidak bisa terlepas dari kesehatan fisik. Pasalnya kesehatan mental juga mempengaruhi kesehatan fisik jemaah haji.

"Gambaran kasus kesehatan mental dalam penyelenggaraan haji diantaranya kasus gaduh gelisah, dimensia dan psikosis. Dengan banyaknya jemaah haji lansia, tentu kasus dimensia akan banyak ditemui. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental dari bio psiko sosial, yaitu menjaga kebugaran, mengelola stres dan suport sistem dalam lingkungan," urainya. **(Feb)-f**

## SALAH SATU PEMENUHAN HAK ANAK Tempat Ibadah Ramah Anak Didorong Semakin Berkembang

**YOGYA (KR)** - Tempat ibadah yang telah menyanggah status ramah anak di Kota Yogya didorong agar semakin berkembang. Baik dari aspek peningkatan jumlah maupun kualitas layanan yang diberikan bagi anak-anak.

Menurut Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Yunianto Dwisutono, hingga saat ini terdapat 24 rumah ibadah yang tersebar di 14 kecamatan se Kota Yogya telah menyanggah status ramah anak. "Keberadaan rumah ibadah ramah anak menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak anak. Harapan kami jumlahnya bisa terus bertambah," tandasnya, Minggu (17/3).

Rumah ibadah ramah anak di Kota Yogya saat ini terdiri dari 18 masjid, tiga gereja, dua klenteng dan satu pura. Untuk tahun ini juga akan ada penambahan satu rumah ibadah ramah anak yakni gereja. Yunianto menjelaskan rumah ibadah memiliki peran penting dan strategis dalam upaya perlindungan anak. Salah satunya dengan cara memberikan edukasi mengenai pentingnya pengasuhan dalam keluarga serta membuka ruang diskusi bagi anak-anak secara aman dan nyaman. "Kami akan terus menjalankan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor. Mulai dari sektor kewilayahan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pendampingan hukum, hingga peribadatan di ru-

mah ibadah," katanya.

Salah satu contoh rumah ibadah ramah anak adalah Masjid Baiturrahman. Setelah dikukuhkan sebagai masjid ramah anak pada tahun 2021 lalu, hingga saat ini masjid yang berada di Kampung Mergangsan Kidul Wirogunan Mergangsan terus mengisi berbagai kegiatannya dengan memperhatikan hak-hak anak. Terutama melalui Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang ada di masjid tersebut. Berbagai variasi kegiatan TPA diarahkan dengan memperhatikan hak-hak anak.

Direktur TPA Masjid Baiturrahman Sugeng Raharjo, mengatakan dalam pelaksanaannya TPA di Masjid Baiturrahman tidak hanya belajar mengaji dan memberikan materi tentang agama islam, namun juga diselingi berbagai permainan anak-anak. "Dengan adanya kegiatan ini, maka akan membawa dampak positif untuk meningkatkan semangat anak-anak untuk lebih giat dalam mengikuti kegiatan TPA," katanya.

Selain itu, lanjutnya, anak-anak juga diajarkan bagaimana bertutur kata yang baik dan sopan, serta mengajarkan tentang pentingnya menghormati orangtua. "Anak pada dasarnya bisa diajarkan dengan baik. Yang terpenting, anak diberi kebebasan mengungkapkan pendapatnya, kita perlu menjadi pendengar yang baik dan menghargai anak. Inshaallah, anak akan menghargai kita, sehingga akan mudah memberikan pelajaran agama kepada anak," imbuhnya. **(Dhi)-f**

## PENGELOLAAN EKSTRAKURIKULER TERSTRUKTUR Agung Rahmanto Juara I Lomba Best Practice

**YOGYA (KR)** - Kepala SD Muhammadiyah Sapen, Agung Rahmanto SH MPd berhasil menjadi juara I Lomba Best Practice Praktik Baik Pengelolaan Sekolah dalam perhelatan akbar Olimpiade Ahmad Dahlan (OlympicAD) VII tingkat Nasional yang dilaksanakan di Kompleks Perguruan Aisyiyah Bale Endah Kabupaten Bandung, belum lama ini.

Kegiatan lomba best practice praktik baik pengelolaan sekolah diikuti ratusan kepala sekolah terbaik utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. "Kami merasa bersyukur dan berbangga, dewan juri telah menobatkan kami sebagai yang terbaik dalam ajang lomba best practice yang sangat bergengsi di lingkungan perguruan Muhammadiyah," ungkap Agung Rahmanto dalam siaran pers yang diterima KR, Minggu (17/3).

SD Muhammadiyah Sapen menyelenggarakan puluhan kegiatan ekstrakurikuler untuk memfasilitasi dan mengembangkan bakat dan talenta peserta didik sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah jam efektif pembelajaran dan dikelola secara terstruktur dan sistematis dengan sangat baik di

bawah masing-masing koordinator.

Agung menjelaskan, pihaknya mengangkat tentang kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolahnya. Kegiatan ekstrakurikuler lazim diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Akan tetapi sebagian besar pengelola sekolah tidak memiliki visi dari penyelenggaraan ekstrakurikuler di sekolahnya. Hal ini pada gilirannya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter dan prestasi siswa didiknya.

Menurut Agung, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler harus dikelola secara terstruktur dan sistematis agar dapat memiliki dampak positif pada pencapaian pembentukan karakter dan pengembangan talenta yang bermuara pada pencapaian prestasi siswa didik.

"Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler yang terstruktur dan sistematis di sekolah kami telah melahirkan banyak raih prestasi dari tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, pengelolaan ekstrakurikuler ini juga memiliki dampak yang signifikan pada pembentukan karakter peserta didik kami," pungkas Agung. **(Dev)-f**



KR-Istimewa  
**Agung Rahmanto**

## PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit di *Harian Kedaulatan Rakyat* tanggal 23 Januari 2024, berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery, Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 17 dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto akan melaksanakan penjualan di muka umum / lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap barang jaminan milik debitur / penjamin hutang atas nama :

- PT. MITRA MEDIKA UTAMA, berupa:**
- 1 (satu) bidang tanah dan berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No.02935 Tgl.18-09-1989 LT. 133 m2 atas nama **Lusiana Dewi, Sarjana Hukum** terletak di Desa/Kelurahan Bancarkembang, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. **Harga Limit Rp.600.000.000,- Uang Penjaminan Rp.200.000.000,-**
  - 1 (satu) bidang tanah sesuai SHM No.267 Tgl.24-04-1996 LT. 1.745 m2 atas nama **Lusiana Dewi, Sarjana Hukum** terletak di Desa/Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. **Harga Limit Rp.2.750.000.000,- Uang Penjaminan Rp.700.000.000,-**
  - 2 (dua) bidang tanah sesuai SHM No.199 Tgl.02-11-1993 LT. 1.210 m2 dan SHM No.201 Tgl.24-01-1994 LT. 1.390 m2 kesemuanya atas nama **Lusiana Dewi, Sarjana Hukum** terletak di Desa/Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. **Harga Limit Rp.4.000.000.000,- Uang Penjaminan Rp.1.000.000.000,-**
  - 1 (satu) bidang tanah sesuai SHM No.160 Tgl.02-11-1988 LT. 1.680 m2 atas nama **Lusiana Dewi, Sarjana Hukum** terletak di Desa/Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. **Harga Limit Rp.2.550.000.000,- Uang Penjaminan Rp.700.000.000,-**

### Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran	: Melalui Internet (Open Bidding)
2. Hari, Tanggal	: Selasa, 26 Maret 2024
3. Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
4. Batas Akhir Penawaran	: Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)
5. Tempat Pelaksanaan Lelang	: KPKNL Purwokerto, Jl. Pahlawan No. 876 Purwokerto
6. Alamat Domain	: portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
7. Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran
8. Peluasan Harga Lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
9. Besa Lelang Pembeli	: 2% dari harga laku lelang
10. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Sesuai PMK No.41/2023	: 1,1% dari harga laku lelang wajib disetorkan pemenang lelang ke rekening penampung Bank BNI paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
11. Informasi Lebih Lanjut	:

- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 17 Jl. Trikora No. 1 Yogyakarta Telp. 081226235585
- Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Purwokerto Jl. Pahlawan No. 876 Purwokerto Telp. 0281-630454

### Deskripsi Persyaratan Lelang:

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada portal.lelang.go.id atau lelang.go.id
2. Menyetorkan uang jaminan lelang sebesar nominal yang dipersyaratkan ke rekening Virtual Account dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang yang dijual apa adanya (kondisi "as is"). Pemenang lelang yang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran, uang jaminan yang sudah dibayarkan akan disetorkan ke Kas Negara.
4. Karena saat dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak - pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan/atau KPKNL Purwokerto.
5. Seluruh biaya pasca lelang, tunggakan pajak berikut denda-denda serta pajak/biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya.
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada portal.lelang.go.id atau lelang.go.id

Yogyakarta, 18 Maret 2024



**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

## OPD-BUMD Harus Bersatu Padu Majukan Ekonomi Warga

**EKONOMI** bagian paling penting untuk menjadikan warga lebih berdaya guna. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang perorang'

Hadirnya pemerintah dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa bermanfaat di setiap kegiatan ekonomi yang disepakati antara pemerintah kota dan legislatif adalah hal mutlak. Hal ini hendaknya tertuang di dalam kebijakan makro sebagai acuan kegiatan pelaksanaan di masyarakat.

Misalnya penyertaan modal kepada Bank Jogja di dalam perda yang saat ini sudah selesai dibahas ada pasal yang menyampaikan bahwa besaran modal yang disetor setidaknya 75% digunakan untuk pengembangan pinjaman khusus UMKM. Kami menyambut baik program dari Bank Jogja tentang pinjaman dengan bunga 0,5% per bulan sebagai salah satu upaya Bank Jogja yang saat ini berganti nama menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkeonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

Untuk itu setiap perda yang menyangkut tentang masyarakat dan hajat hidup orang banyak yang khusus mengenai ekonomi hendaknya berorientasi kepada seperti

Oleg Yohan  
Fraksi NasDem



KR-Istimewa

contoh tersebut. Perlu tindakan satu padu antara OPD dan BUMD. Jika membahas kebijakan tentang hajat masyarakat harus ada pasal yang menegaskan keberpihakan secara langsung dengan peningkatan kegiatan ekonomi.

Di sisi lain OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di bidang ekonomi yaitu Dinas Perindustrian Koperasi dan UMK (PKU) dan Dinas Perdagangan harus memberikan pelayanan ser-

ta kemudahan.

Kemudian berkolaborasi serta memberikan dukungan secara riil kepada masyarakat utamanya UMKM. Meskipun kita menyadari akan diberlakukannya pajak sebesar 12% di tahun 2025 harus disikapi secara bijak. Sehingga perlu langkah-langkah strategis agar kenaikan pajak tersebut membawa dampak baik secara ekonomi maupun individu pelaku usaha.

Inshaallah periode 2024-2029 saya tetap di Komisi B agar bisa lebih maksimal dan tajam untuk melakukan program yang selama ini tetap kami laksanakan. Misalnya program Klinik UMK Omah Sedoyo secara kontinyu akan tetap kami laksanakan setiap Jumat jam 15.00 WIB. Sehingga ini perlu dukungan secara langsung mengingat masyarakat banyak yang terbantuan.

Di sisi lain menjelang dipersiapkannya Pilkada 2024, masyarakat harus ikut terlibat di dalam penentuan kebijakan selanjutnya. Karena pemimpin yang berorientasi kepada masyarakat banyak dan peduli dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menentukan kebijakan kelak. **(\*)-f**